

KEPEMIMPINAN KEPALA SUKU DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KAMPUNG UGO DISTRIK KOMBAY KABUPATEN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA

Habel Kumeya¹
Johny P. Lengkong²
Trintje Lambey³

Abstrak

tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Kepemimpinan Kepala Suku Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kampung Ugo Distrik Kombay Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Tahun 2020. Kepemimpinan informal di Papua saat ini cenderung tergusur atau terpinggirkan oleh kepemimpinan formal terutama dalam sistem pemerintahan kampung. Dipilihnya kepemimpinan formal sebagai kepemimpinan resmi yang digunakan secara seragam dalam sistem pemerintahan kampung, namun keberadaan pemimpin informal tetap memiliki pengaruh yang kuat ditengah masyarakat termasuk dalam mempengaruhi pilihan masyarakat dalam pilkada. Seperti kita ketahui, bahwa kampung memiliki organisasi pemerintahan yang seragam di seluruh Papua. Padahal jika kita telusuri secara detail, kepemimpinan informal masih terdapat dan dilestarikan oleh masyarakat kampung di Papua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun dalam penelitian ini menggunakan teori dari Ferry Marpaung, Sutadji dan Margono (2014 : 1619 – 1620) menegaskan peran kepemimpinan: Peran Mempengaruhi, Peran Memotivasi, Peran Informasional dan Peran pengambil keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Suku Kombay merupakan seorang pemimpin informal masyarakat distrik kombay yang ada pada pemilihan bupati kabupaten Boven Digoel memiliki peran dan pengaruh. Pengaruh kepala suku mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan tersebut. Pengaruh kepala suku juga dapat meredam kekisruhan yang terjadi di masyarakat. Bahkan mempengaruhi pilihan masyarakat

Kata Kunci: : Partisipasi Politik, Masyarakat, Pilkada

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

² *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

³ *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

Pendahuluan

Kabupaten Bouven Digoel memiliki 7 (tujuh) distrik yaitu Distrik Kombay, Distrik Kouh 1, Distrik Boma 2, Distrik Yaniruma, Distrik Kaiban wilayah Mappi, Distrik Kawagit 1 dan Distrik Firiwage 1. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus di Distrik Kombay yang memiliki 5 kampung yakni Wanggemalo, Kampung Ugo, Kampung Dema, Kampung Manggaret Ugo 2, dan Kampung Mangeto Wanggemalo 2. Adapun kepala suku Kombay bernama Bilare Wondilo, S.IP, MM dan Kepala Distrik Kombay bernama Yohanes Yuwalo, S.IP.

Dalam setiap organisasi selalu terdapat hubungan yang akan menentukan corak organisasi. Hubungan informal akan melahirkan organisasi informal. Berbeda dengan kepemimpinan formal adalah kepemimpinan yang resmi yang melalui mekanisme pengangkatan resmi untuk menduduki jabatan kepemimpinan. Pola kepemimpinan tersebut terlihat pada berbagai ketentuan yang mengatur hirarki dalam suatu organisasi. Namun kepemimpinan formal tidak akan secara otomatis menjadi jaminan seorang pemimpin diterima sebagai pemimpin yang “sebenarnya” oleh bawahan. Penerimaan atas pimpinan formal masih harus diuji dalam praktek yang hasilnya akan terlihat dalam kehidupan organisasi. Sementara kepemimpinan informal yang juga disebut headship merupakan tipe yang tidak mendasarkan pada pengangkatan serta tidak terlihat pada struktur organisasi resmi. Namun efektifitas kepemimpinan informal terlihat pada pengakuan nyata dan penerimaan bawahan dalam praktek kepemimpinannya. Biasanya kepemimpinan informal didasarkan pada beberapa kriteria. Di antaranya adalah kemampuan “memikat” hati orang lain, kemampuan dalam membina hubungan yang serasi dengan orang lain dan memiliki keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain.

Tersebar nya suku suku di Papua secara antropologis membentuk karakter kepemimpinan informal yang sudah dipraktekkan jauh sebelum adanya kepemimpinan formal seperti sekarang ini.

Namun secara nyata saat ini kepemimpinan formal jauh lebih berkembang dan menjadi pilihan utama dalam sistem pemerintahan kampung. Kampung Ugo merupakan salah satu kampung di Distrik Kombay Kabupaten Boven Digoel yang masih memelihara kepemimpinan informal. Disamping itu juga, Kampung Ugo memiliki organisasi pemerintahan kampung yang formal.

Dalam pemilihan kepala daerah peran dari pemimpin informan tersebut sangat penting dalam mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih pasangan calon. Keberadaan para pemimpin informal dipandang masyarakat sebagai orang yang disegani dan dihormati di kampung, Pemimpin-pemimpin yang dimaksudkan adalah kepala suku, mereka ini pula dapat diberikan tanggung jawab dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan tertentu.

Pemimpin-pemimpin informal ini biasanya punya pengaruh yang kuat didesa, dan mereka sangat disegani oleh masyarakat, mereka tampil sebagai pendorong bagi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan, pemberi motivasi bagi masyarakat yang bermasalah dan ragu-ragu, pengayom untuk masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan, pemberi bimbingan kepada masyarakat yang belum berpengalaman serta dapat pula meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, pemimpin informal merupakan orang-orang yang terpandang karena wibawa, pekerjaan dan kekayaannya pemimpin informal biasanya memberikan pekerjaan kepada masyarakat setempat sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Pemilihan Kepala Daerah yakni bupati dan wakil bupati Kabupaten Boven Digoel dilaksanakan pada tahun Desember tahun 2020, yang dimenangkan oleh pasangan Yaluwo - Lexi Romel Wagiu. Adapun pasangan calon yang berkompetisi dalam pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sebelum pemilihan suara ulang adalah sebagai berikut:

1. Hengki Yaluwo - Lexi Romel Wagi
2. H Chaerul Anwar Natsir - Nathalis Belarmunus Kaket

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

3. Martinus Wagi, SP - Isak Bangri
4. Yusak Yaluwo, SH MSi - Yakob Weremba

Yang kemudian diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Hengki Yaluwo, SSos - Lexi Romel Wagi meraih 2.164 suara
2. H. Chaerul Anwar Natsir, ST - Nathalis Belarmunus Kaket meraih 3.226 suara
3. Martinus Wagi, SP - Isak Bangri meraih 9.156 suara
4. Yusak Yaluwo, SH MSi - Yakob Weremba meraih 16.319 suara

Hasil penghitungan suara itu digugat ke MK dan dikabulkan. Sebab, Yusak terbukti mantan terpidana yang belum lewat 5 tahun. Alhasil, MK memutuskan memerintahkan KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel dalam jangka waktu paling lama 90 hari kerja sejak putusan ini diucapkan tanpa mengikutsertakan pasangan calon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba.

Atas putusan di atas, KPU kembali menggelar pilkada dengan peserta:

1. Hengki Yaluwo, SSos - Lexi Romel Wagi
 2. H. Chaerul Anwar Natsir, ST - Nathalis Belarmunus Kaket
 3. Martinus Wagi, SP - Isak Bangri
- Maka digelar pilkada jilid II pada 17 Juli 2021. Hasilnya KPU menetapkan:

1. Hengki Yaluwo-Lexi Romel Wagi mendapat 10.835 suara.
2. Chaerul Anwar-Nathalis B Kaket meraih 1.236 suara.
3. Marthinus Wagi-Isak Bangri memperoleh 8.863 suara

Pasangan kepala daerah ini dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91/4798 tahun 2001, tentang perubahan keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131/91/353 tahun 2001 tentang pengesahan, pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di wilayah setempat.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten

Boven Digoel Athanasius Koknat Wikom dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini merupakan amanat yang wajib dihormati. Disampaikannya pula bahwa pilkada Boven Digoel di bulan Desember 2020 berjalan dengan lancar walaupun dilakukan pemungutan suara ulang pada tanggal 17 Juli 2021 yang merupakan keputusan dari Mahkamah Konstitusi. (<https://www.bovendigoelkab.go.id>).

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan mengenai peran dari kepala suku dalam pemilihan kepala daerah di Kampung Ugo Distrik Kombay Kabupaten Boven Digoel, sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan masyarakat, kebanyakan masyarakat mendengarkan arahan dari para pemimpin informal tersebut, karena mempercayai dan menghargai ketokohan mereka dan dipercayai lebih pintar dari kebanyakan orang di kampung.

Berdasarkan pengamatan peneliti tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai peran dari pemimpin informal yang ada di kampung Ugo Distrik Kombay dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2020, peneliti melihat bahwa pengaruh besar dari pemimpin informal dapat mempengaruhi pilihan serta partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kampung Ugo.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Kepemimpinan

Secara etimologi kepemimpinan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Berasal dari kata dasar Pimpin (dalam bahasa inggris *lead*) berarti membimbing atau tuntun
2. Setelah ditambah awalan pe menjadi pemimpin (dalam bahasa inggris *leader*) berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan, komunikasi sehingga orang lain bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu
3. Setelah dilengkapi dengan awalan ke menjadi kepemimpinan (dalam bahasa inggris *leadership*) berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam

mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok. (Inu Kencana 2003:1)

Kepemimpinan merupakan aspek pengelolaan yang penting dalam sebuah organisasi/lembaga. Kemampuan untuk memimpin secara efektif sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam usahanya mencapai tujuan tersebut maka ia haruslah mempunyai pengaruh untuk memimpin para bawahannya.

Menurut Sudarwan Danin (2004;56) Kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok yang tergabung diwadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Oemar Hamalik (2001;166) Seorang pemimpin dalam melaksanakan peran-peran kepemimpinan antara lain :

1. Peran sebagai katalisator, seorang pemimpin harus menumbuhkan pemahaman dan kesadaran orang-orang yang dipimpinnya supaya yakin bahwa tindakan yang dia lakukan adalah untuk kepentingan semua anggota organisasi. Para anggota supaya merasa bahwa hasil kerja kepemimpinannya bukan semata-mata menguntungkan semua anggota organisasi secara keseluruhan. Karena itu pemimpin bertugas :
 - a. Melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh kelompok, baik masalah intern maupun masalah ektern.
 - b. Merumuskan masalah yang paling penting dan masalah yang sering terjadi atau dihadapi oleh anggota kelompok.
 - c. Merumuskan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dan

mencari berbagai alternatif pemecahannya.

2. Peran sebagai fasilitator, seorang pemimpin harus berupaya mendorong dan menumbuhkan kesadaran para anggota organisasi yang dipimpinnya supaya melakukan perubahan yang diharapkan untuk meningkatkan organisasi. Pemimpin tidak berperan sebagai pemrakarsa saja melainkan aktif memberi kemudahan bagi para anggotanya.
3. Peran sebagai pemecah masalah, seorang pemimpin harus mampu bertindak cepat, tepat dan tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi oleh organisasi, dan berusaha memecahkan masalah tersebut. Dia harus mampu menentukan saat dan bentuk pemberian kepada anggota atau kelompok, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan setiap gerak langka yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada.
4. Peran sebagai penghubung sumber, seorang pemimpin harus berupaya mencari sumber-sumber yang berkenan dalam kondisi dan kebutuhan organisasi, dengan sumber-sumber tersebut, pemimpin harus membantu organisasi atau kelompok untuk mengetahui bagaimana cara-cara pendekatan yang dapat dilakukan untuk memperoleh bantuan yang diperlukan dalam rangka memecahkan masalah yang di hadapi.
5. Peran sebagai komunikator, seorang pemimpin harus mampu mengkomunikasikan gagasan-gagasannya kepada orang lain, yang selanjutnya menyampaikan kepada orang lain secara berlanjut. Bentuk komunikasi yang harus dilakukan secara dua arah supaya gagasan yang disampaikan dapat dibahas secara luas, yang mencakup para pelaksana dan khalayak sasaran perlu menguasai teknik berkomunikasi secara efektif

Pemimpin Informal

Menurut M. Karjadi (1981 : 6)

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

mengemukakan bahwa pemimpin informal ini tidak mempunyai dasar pengangkatan resmi, tidak nyata terlihat dalam hirarki organisasi, juga tidak terlihat gambaran bagan.

Pemimpin ini dengan spontan diterima secara baik oleh para anak buahnya, oleh karena pemimpin informal ini memancarkan gaya atau sifat-sifat kepemimpinan yang sungguh-sunggu seperti :

1. Kemampuan memikat orang lain
2. Dapat menempatkan dirinya tepat diantara anak buah dengan hubungan yang serasi.
3. Memang menguasai organisasi dan tujuannya dengan baik
4. Memiliki teknik-teknik kepemimpinan yang tepat
5. Memiliki kelebihan-kelebihan baik fisik, psikhis dan mental.

Pemimpin informal ini lazimnya timbul sewaktu-waktu, ialah pemimpin yang muncul secara insidental dalam kelompok pada situasi-situasi tertentu.

Pemimpin-pemimpin informal ini biasanya punya pengaruh yang kuat didesa, dan mereka sangat disegani oleh masyarakat. Mereka tampil sebagai pendorong, pemberi motivasi, pengayom, pemberi bimbingan khususnya dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat.

Oleh sebab itu pula mereka dapat diberikan tanggung jawab dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan. Kepemimpinan semacam ini biasanya oleh kelompok benar-benar dirasakan memberikan sumbangan-sumbangan yang berharga bagi kelompok itu. Ini biasanya berlaku dalam tempo yang singkat maupun yang lama, akan tetapi yang terang bahwa kepemimpinan informal itu diperoleh bukan karena pengangkatan, akan tetapi diperoleh sebagai suatu penghormatan berkat kecakapan-kecakapannya yang telah diperlihatkan dalam memajukan usaha-usaha bersama secara bekerjasama dengan mereka yang dipimpin (M. Karjadi 1981 : 7).

Winardi mengemukakan (1993 : 55)

bahwa pemimpin informal adalah seorang individu yang walaupun tidak mendapatkan pengangkatan formal yuridis sebagai pemimpin, namun memiliki sejumlah kualitas yang memungkinkannya mencapai kedudukan sebagai orang yang dapat mempengaruhi kelakuan serta tindakan sesuatu kelompok masyarakat baik dalam arti positif maupun negatif.

Kartini Kartono (1996 : 26) mengemukakan ciri-ciri pemimpin informal antara lain:

1. Tidak memiliki penunjukan formal atau legitimitas sebagai pemimpin.
2. Kelompok rakyat atau masyarakat menunjukan dirinya dan mengakuinya sebagai pemimpin. Status kepemimpinannya berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengakui dan menerima dirinya.
3. Dia tidak mendapatkan dukungan dari suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinannya.
4. Biasanya tidak mendapatkan imbalan jasa atau imbalan jasa itu diberikan secara sukarela.
5. Tidak dapat dimutasikan dan tidak pernah mencapai promosi dan tidak memiliki atasan. Dia tidak perlu memenuhi persyaratan formal tertentu.
6. Apabila dia melakukan kesalahan, dia tidak dapat dihukum hanya saja respek orang-orang terhadapnya jadi berkurang, tidak diakui atau ditinggalkan masanya.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Guna memberikan arahan dan juga tuntunan agar penelitian tidak melabar ke hal lain yang diluar penelitian, maka peneliti menetapkan Fokus dalam meneliti peran pemimpin informal dalam pemilihan kepala daerah di kampung Ugo tahun 2020 pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati dengan menggunakan pendapat Ferry Marpaung, Sutadji dan Margono (2014 : 1619 – 1620) menegaskan peran kepemimpinan :

1. Peran Mempengaruhi
2. Peran Memotivasi
3. Peran Informasional

4. Peran pengambil keputusan

Informan dalam penelitian ini terdiri adalah :

- Kepala Suku
- Kepala Kampung Ugo
- Masyarakat

Pembahasan

Pilkada langsung merupakan arus balik politik lokal atau sering disebut pergeseran dari sistem elite vote ke popular vote. Sehingga, dalam realitasnya tidak jarang ditemukan permasalahan disana sini, namun permasalahan yang paling sering terjadi adalah benturan berbagai kepentingan politik sehingga dalam ajang Pilkada terkadang terjadi konflik yang sepertinya sulit terhindarkan. Kedudukan kepala daerah sebelumnya ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat tanpa melihat aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal kemudian berbalik kepada masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin daerahnya.

Pilkada dapat juga memberi ruang bagi elit-elit masyarakat lokal untuk mengaktualkan setiap gagasan ataupun kepentingan politik untuk kebaikan masyarakatnya. Karena elit masyarakat mempunyai kedekatan ikatan emosional dengan masyarakat, maka untuk mengakomodir berbagai gagasan-gagasan untuk kepentingan masyarakat, tokoh masyarakat diharapkan mampu menyambut kebijakan desentralisasi tersebut. Keberadaan elit masyarakat seperti yang ada di Kabupaten Boven Digoel, cenderung masih terikat oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai lama yakni tradisi dan ikatan kulturalnya. Keterlibatan para elit lokal, dalam proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung tidak bisa dihindarkan, karena mereka adalah potensi lokal yang dapat memberikan kontribusi atau memberi warna tersendiri bagi perpolitikan di tingkat daerah. Dengan kemampuannya bisa menciptakan kondisi politik yang kondusif dimana peran mereka sangat menentukan dalam menciptakan rakyat yang partisipatif. Keterlibatan dalam penggalangan massa misalnya, mereka mempunyai kemampuan

masing-masing.

Tokoh politik, tokoh agama maupun tokoh masyarakat atau adat sebagai elit lokal mempunyai karakteristik tersendiri untuk memberikan dukungan dalam Pilkada. Peranan kaum elit sebagai pemegang sumber-sumber kekuasaan seperti sumber ekonomi, sosial budaya dan lain-lain, sehingga secara otomatis mereka dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu orang yang memiliki pengaruh di dalam masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Elit lokal dalam pengaruhnya dapat memotori perilaku masyarakat untuk menetapkan pilihannya, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam Pilkada. Pelaksanaan Pilkada langsung tentunya sangat dibutuhkan peran dari para elit lokal dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, karena sesungguhnya tanpa disadari dimata masyarakat elit lokal merupakan sosok yang disegani dan patut untuk diteladani. Realita yang terdapat di masyarakat, tokoh-tokoh agama dan adat punya kharisma tersendiri yang dapat dan mampu merubah sifat, cara pandang bahkan tingkah laku seseorang untuk menjadi yang lebih baik. Dalam kaitannya dengannya Pilkada langsung yang dilaksanakan di Kabupaten Boven Digoel, partisipasi politik masyarakat tidak terlepas dari peranan tokoh agama dan tokoh adat dalam mengoptimalkan masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi pada Pilkada.

Fokus dalam meneliti peran pemimpin informal dalam pemilihan kepala daerah di kampung Ugo tahun 2020 pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati dengan menggunakan pendapat Ferry Marpaung, Sutadji dan Margono (2014 : 1619 – 1620) menegaskan peran kepemimpinan :

1. Peran Mempengaruhi

Kepala Suku ialah sebuah sebutan yang ditujukan kepada seseorang yang menjadi figure sentral dalam sebuah suku atau kelompok masyarakat. Namun, banyak orang mengkonotasikan suku sebagai sebuah kelompok masyarakat yang hidupnya masih jauh dari unsur peradaban. Sebagian masyarakat suku sering di identik dengan sebuah kelompok masyarakat hayati di

pedalaman hutan. Mereka mengisolasi diri dari kehidupan global luar. Kepala suku memiliki sebuah peran sosial terikat pada hukum formal yang berlaku dalam sebuah negara.

Kemampuan mempengaruhi masyarakatnya harus dimiliki oleh seorang kepala suku, adat yang dimiliki oleh penduduk distrik Korbay dan kampung ugo telah terbentuk sejak lama dan masyarakat sangat menghormati dan mendengarkan kepala sukunya, termasuk ketika dalam pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah yang berlangsung.

Dalam kehidupan masyarakat yang menganut paham kesukuan, peran kepala suku sangat sentral tidak sembarang dalam kelompok atau suku tersebut. Inilah yang membedakan masyarakat tergolong dalam kehidupan suku dengan masyarakat yang sudah menganut paham modernitas atau mengenal peradaban. Ada beberapa faktor penentu yang menjadikan seseorang dapat dipilih dan menduduki jabatan sebagai kepala suku. Biasanya seorang kepala suku dipilih berdasar faktor keturunan dan harus berjenis kelamin laki-laki. Jika garis keturunan langsung dari seorang kepala suku tak ada yang berkelamin laki-laki, barulah jabatan kepala suku akan ditentukan melalui sebuah upacara adat. Dalam upacara adat, biasanya di ikuti oleh para sesepuh dan tokoh suku tersebut yang memutuskan tentang siapa kepala suku baru, jika kepala suku meninggal maka di ganti dengan keturunan laki-laki.

Dalam penelitian ini peran dari kepala suku dalam mempengaruhi masyarakat yang ada di distrik korbay khususnya kampung ugo sangatlah besar dan menurut para informan masyarakat kampung ugo secara khusus dan distrik korbay pada umumnya menuruti himbuan dari kepala suku. Pengaruh kepala suku bahkan mampu mempengaruhi pilihan masyarakat, hal tersebut diungkapkan oleh beberapa informan yang mengatakan bahwa mereka memilih atas dasar arahan dari kepala suku.

2. Peran Memotivasi

Peran Kepala Suku adalah mengatur masalah adat-istiadat dimana masalah

masalah yang apa terjadi maka dia yang selesai oleh sebab itu masyarakat semua mendengar apa yang di lakukan oleh kepala suku . Masalah demokrasi Kepala suku juga mendengar dari Kepala Distrik dan Masyarakat untuk ikut partisipasi dalam kegiatan politik yang berjalan secara langsung dan dia juga ikut serta memilih. dan secara Demokratis tidak ada unsur paksaan dari Kepala Suku terhadap warga masyarakat Distrik Korbay. Oleh karena itu bahwa kesadaran dan pemahaman politik merupakan penunjang dalam mewujudkan stabilitas politik masyarakat dengan kesadaran dan pemahaman politik pula setiap sikap dan perilaku masyarakat secara partisipasi.

Permasalahan Kepala Suku mampu menyerahkan masyarakat dalam partisipasi yang menjadi focus kepala suku di dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Adapun yang menjadi peran dari pada kepala suku adalah memberikan pengarahan, pembinaan, motivasi kepada anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. kepala suku mengatur masyarakat untuk berpartisipasi jalannya pemilihan umum dan mengatur masalah-masalah yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat terkait dengan pesta demokrasi diselesaikan oleh kepala suku.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, Sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik masyarakat berpengaruh terhadap jalannya suatu pemerintahan. Pada suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap pengambilan keputusan masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki pilihan dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian, peran dari kepala suku dalam memotivasi masyarakat adalah untuk ikut memilih dalam pemilihan bupati di TPS, bapak kepala suku tidak secara langsung untuk memilih calon tertentu, namun kebanyakan masyarakat

telah mengetahui pilihan dari kepala suku dan ikut memilih pilihan yang diajukkan oleh kepala suku, karena beliau juga memiliki hak pilih yang sama dengan masyarakat. Kegiatan yang memotivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya adalah pada saat pertemuan-pertemuan formal maupun pada saat tidak formal.

3. Peran Informasional

Dalam hal pemilihan atau pun pengangkatan kepala adat atau pemangku adat serta pembantunya misalnya, unsur mutlak adalah didasarkan pada keturunannya atau turun temurun dan ini semua hampir terjadi dalam masyarakat hukum adat di Indonesia, tetapi ada pula yang kemudian dipilih berdasarkan kesepakatan atau hasil musyawarah dari masyarakat hukum adat setempat. Biasanya orang-orang tua yang terkemuka dan mempunyai pengaruh serta dianggap mampu menjadi kepala adat yang kemudian dipilih menjadi pemimpin mereka. Tugas dan Fungsi serta peranan dari setiap kepala adat pun hampir sama dari satu masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat lainnya secara umum ialah mengawasi perikelakuan warga masyarakat setempat dan menjadi pengayom bagi masyarakatnya.

Orang yang kemudian menjadi seorang kepala adat atau pemangku adat adalah bukanlah orang sembarangan, seseorang yang kemudian dipilih berdasarkan kemampuannya, mampu bertanggung jawab atas tugasnya dan yang lebih penting lagi adalah mampu menjaga kearifan dan kelestarian dari masyarakat hukum adat tersebut sesuai pesan leluhur atau pun kebiasaan masyarakat hukum adat setempat.

Keberadaan kepala suku Korbay bukan hanya sekedar sebagai orang yang bertanggungjawab akan sukunya namun juga telah bertransformasi sebagai sumber informasi. Termasuk dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel. Kepemimpinan kepala suku bukan hanya memerintah saja, namun juga memberikan pendidikan kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk menyalurkan

hak pilih mereka di pilkada lalu.

Dalam penelitian ini, dari informasi yang didapatkan dari informan terutama informan masyarakat, mereka memperoleh arahan untuk memilih calon tertentu namun tidak dengan paksaan dan kepala suku selalu memberikan informasi mengenai perkembangan pemilihan. Dengan kharisma dan wewenang yang diberikan, kepala suku mampu bertindak selaku pihak informasional bagi masyarakatnya bekerjasama dengan pemerintah distrik dan penyelenggara pemilihan kepala daerah.

4. Peran pengambil keputusan

Berdasarkan hasil peneliti bahwa kepala suku sangat berperan dalam pengambilan keputusan yaitu memecahkan masalah-masalah adat istiadat, sosial kemasyarakatan, dan politik khususnya pemilihan umum, yaitu memberikan arahan kepada masyarakat untuk turut serta dalam pemilihan umum memberikan suara untuk memilih salah satu partai dan calon sesuai dengan hati nurani mereka di TPS.

Kepemimpinan kepala suku Korbay memang telah turun temurun dan menjadi adat istiadat masyarakat yang ada di suku korbay, kepala suku mampu mengambil keputusan terkait banyak hal di masyarakat, oleh sebab itu perannya sangat vital dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Kekuasaan seorang kepala suku dalam adat dapat dikategorikan ke dalam kewenangan. Kewenangan yang dimiliki oleh kepala suku merupakan kewenangan tradisional dan kewenangan kharismatik. Hal ini didasarkan pada aturan adat istiadat yang diturunkan dari leluhur. Dalam kewenangan ini, seorang kepala suku memiliki otoritas berdasarkan patriarkalisme dimana memiliki otoritas warisan yaitu diturunkannya sebuah kekuasaan berdasarkan garis keturunan.

Seorang kepala suku mampu menyelesaikan masalah-masalah adat serta mengatur sistem adat yang berhubungan dengan adat istiadat. Kewenangan dan kekuasaan seorang kepala suku di dalam adat ternyata berlangsung hingga proses-proses pemerintahan Negara. Kepala suku yang memiliki kekuasaan terhadap masyarakatnya, ternyata sangat berpengaruh terhadap setiap

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

proses pemerintahan Daerah dan Negara. Pengambilan keputusan dan sebagainya merupakan hak dari seorang kepala suku. Salah satu proses yang menunjukkan pentingnya seorang kepala suku adalah proses pemilukada.

Penutup

Kesimpulan

1. Dilihat dari kekhasan yang ada di wilayah Papua dimana dan didalamnya ada suku kumbay, Kepala Suku Kumbay merupakan seorang pemimpin informal masyarakat distrik kumbay yang ada pada pemilihan bupati kabupaten Boven Digoel memiliki peran dan pengaruh. Pengaruh kepala suku mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan tersebut. Pengaruh kepala suku juga dapat meredam kekisruhan yang terjadi di masyarakat. Bahkan mempengaruhi pilihan masyarakat.
2. Kepemimpinan kepala suku kumbay dalam pemilihan bupati Boven Diogel di Kampung Ugo dapat terlihat dengan adanya motivasi yang diberikan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta untuk memilih di TPS.
3. Kepala Suku Kumbay juga berperan sebagai pihak yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat, dimana kepala suku pada tahapan pemilihan datang ke masyarakat membuat pertemuan dan memberikan informasi seputar calon dan pemilihan bupati.
4. Peran dari kepala suku kumbay dalam pengambilan keputusan sangat besar pada pemilihan bupati, dimana kepala suku mampu mengambil keputusan sendiri untuk memilih calon, mengarahkan masyarakat dan juga menenangkan masyarakat serta mampu mengumpulkan kepala kampung untuk musyawarah.

Saran

1. Disarankan kepada pemerintah, perlu adanya pemisahan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh kepala suku dalam

menjalankan tugas dan fungsinya agar tidak terjadi salah persepsi anatar tugas kepala pemerintahan dengan kepala suku, terutama dalam pemilihan umum yang diselenggarakan diwilayah Kumbay.

2. Perlu dilakukan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, untuk menjalankan fungsi partai politik, agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan partisipasi politiknya.
3. Perlu dilakukan evaluasi kembali mengenai keputusan yang diambil kepala suku dalam menentukan pilihan pada salah satu calon atau partai.

Daftar Pustaka

- Bernadine R. Wirjana, M.S.W dan Susilo Supardo, 2006, *Kepemimpinan, Dasar-Dasar Dan Pengembangannya*. CV. Andi offset. Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Danim, sudarwan, 2004. *Motivasi, kepemimpinan dan efektifitas kelompok*. Jakarta; PT. Rineka Cipta
- Ferry Marpaung, Sutadji dan Margono 2014 dalam e jurnal Administrative Reform Volume 02 Nomor 3 Universitas Mulawarman Samarinda (2014
- Gaffar, J. M. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hamalik, Oemar. 2001. *Pengembangan sumberdaya manusia manajemen peletihan Ketatanegaraan; pendekatan terpadu* jakarta : Bumi Aksara
- Inu Kencana Syafi'ie, 2003, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Refika Aditama
- Irtanto. 2008. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Karjadi Muhammad. 1981. *Kepemimpinan Yang Efektif*. Yogyakarta: Gadjah mada University Press.
- Kartono, Kartini 1996. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Cetakan kedelapan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Kerlinger dan Padhazur (2002),. *Pengertian Kepemimpinan, Manejemen Sumber daya manusia*

Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong (editor). 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* edisi ketiga. Jakarta : Prenada Media Group

Ndraha, Taliziduhu. 2012. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta

Nordholt dan Gery van Klinken, Politik Lokal di Indonesia, Jakarta. : YOI & KITLV, 2007

Purwoko, B. 2005. *Isu-Isu Strategis Pilkada Langsung: Ekspresi Kedaulatan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*. Laboratorium Politik Unsoed: Jurnal Swara Politika.

Prihatmoko, J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Semarang: Pustaka Pelajar.

Priyono dan Marnis, 2014. *Manajemen sumber daya manusia*, Surabaya: penerbit Zifatama Publisher

Rianto. A. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: GranitRohaniah, Y. dan Efriza. 2015. *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Instrans Publishing.

Siagian.Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara. Jakarta

Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru. Press

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.

Surbakti, R. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.

Winardi. 1993. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Sumber Lain :

<https://www.bovendigoelkab.go.id>